



**LURAH TRIHARJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL**

PERATURAN KALURAHAN TRIHARJO

NOMOR 08 TAHUN 2021

T E N T A N G

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TRIHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL
KALURAHAN TRIHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021**



LURAH KALURAHAN TRIHARJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TRIHARJO
NOMOR 08 TAHUN 2021

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TRIHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kalurahan wajib menyusun perencanaan pembangunan Kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Triharjo tentang Peraturan Kalurahan Triharjo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 961);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
16. Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 12);
17. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TRIHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kalurahan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa Triharjo atau disebut dengan nama lain Kalurahan Triharjo adalah Kalurahan yang terletak di Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kalurahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
10. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.

11. Perencanaan pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kalurahan dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
14. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kalurahan.
15. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Kalurahan.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Daftar Usulan RKP Kalurahan adalah penjabaran RPJM Kalurahan yang menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

19. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
20. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang syah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kalurahan , adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana Transfer Ke Daerah.
25. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat,
26. Lembaga adat Kalurahan adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Kalurahan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Kalurahan.

27. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
28. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Kalurahan

Pasal 2

- (1). RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Landasan Hukum
- d. Hubungan Antar Dokumen

BAB II EVALUASI RKPDes TAHUN SEBELUMNYA

- a. Realisasi Pendapatan
- b. Penggunaan Anggaran

BAB III MEKANISME PENYUSUNAN RKP Kalurahan

- a. Penyusunan RKP Kalurahan
- b. Pencermatan Pagu Indikatif dan Penyelerasan Program Kegiatan
- c. Musyawarah Kalurahan

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

BAB V DAFTAR USULAN RKP Kalurahan DAN USULAN KEGIATAN YANG DIDANAI OLEH DANA KEISTIMEWAAN

- a. Gambaran Umum Usulan RKP Kalurahan
- b. Program Kegiatan Usulan RKP Kalurahan
- c. Usulan Kegiatan yang Didanai oleh Dana Keistimewaan

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- (2) Penjabaran sistematika RKP Kalurahan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini

Pasal 3

RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta pertanggungjawaban oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum musyawarah Kalurahan.

Pasal 5

RKP Kalurahan dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau;
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Bamuskal dalam Musyawarah Kalurahan dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2022.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah.

Ditetapkan di Triharjo
Pada tanggal
LURAH TRIHARJO

SUWARDI

Diundangkan di Triharjo
Pada tanggal
CARIK KALURAHAN TRIHARJO

SOFUWAN ADIL KURNIAWAN

LEMBARAN KALURAHAN TRIHARJO TAHUN 2021 NOMOR
NOREG PERATURAN KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON PANDAK
KABUPATEN BANTUL NOMOR : (... /TRIHARJO/2021)

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari initanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Suratminingsih, S.Pd.
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Triharjo
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Triharjo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Suwardi, S.Pd.
Jabatan : Lurah Triharjo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Triharjo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Triharjo tentang : RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022 untuk **DIMINTAKAN NOMOR REGISTER KAPANEWON**.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
LURAH TRIHARJO

PIHAK KESATU
KETUA BAMUSKAL TRIHARJO

SUWARDI, S.Pd.

SURATMININGSIH, S.Pd.

DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TRIHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PANDAK
KALURAHAN TRIHARJO
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dimana kedepan akan menjadi pedoman dasar Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan pembangunan di Kalurahan Triharjo.

Sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 ada tiga poin utama yang menjadi fokus pemerintah Kalurahan Triharjo. Terkait pemulihan ekonomi, program prioritas nasional dan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam . Berkenaan dengan hal tersebut, sehingga diperlukan adanya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2022.

Besar harapan kami bahwa Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2022 dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu, dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kalurahan dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Triharjo, 2021
Lurah Triharjo

Suwardi, S.Pd.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-----------|
| Kata Pengantar | 2 |
| Daftar Isi | 3 |
| BAB I PENDAHULUAN | 4 |
| a. Latar Belakang | 4 |
| b. Maksud dan Tujuan | 5 |
| c. Landasan Hukum | 6 |
| d. Pengertian | 9 |
| e. Hubungan Antar Dokumen | 13 |
| BAB II EVALUASI RPKAL TAHUN SEBELUMNYA..... | 14 |
| a. Realisasi Pendapatan | 14 |
| b. Penggunaan Anggaran | 15 |
| BAB III MEKANISME PENYUSUNAN RPKAL..... | 16 |
| a. Penyusunan RPKal | 16 |
| b. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan ... | 18 |
| c. Musyawarah Kalurahan | 29 |
| BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN | 30 |
| BAB V DAFTAR USULAN RKPDES | 42 |
| a. Gambaran Umum Usulan RPKal | 42 |
| b. Program Kegiatan Usulan RPKal | 43 |
| BAB VI PENUTUP | 44 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kalurahan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pola pemikiran sebagaimana dimaksud diatas, dimana bahwa kalurahan berwenang mengurus di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, Dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat kalurahan, maka sebuah kalurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di kalurahan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka Kalurahan diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) sebagai penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, selain itu Kalurahan juga harus menyusun Daftar Usulan RKPKal yang merupakan bagian dari RKPKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

RKPKal adalah Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMKal, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal

yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan kalurahan, RKPKal merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular. RKPKal merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Kalurahan dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBKal tahun anggaran bersangkutan dan menjadi pedoman pembangunan pemerintah kalurahan, lembaga kalurahan maupun masyarakat.

Dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, khususnya di pasal 49 diatur tentang perubahan RKPKal. Perubahan RKPKal dilakukan apabila perlu dilakukan perubahan APBKal, karena perubahan APBKal harus didahului dengan perubahan RKPKal.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPKal) tahun 2022 adalah rencana pembangunan tahunan kalurahan yang disusun oleh Tim Penyusun untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun anggaran. Rencana Pemerintah Kalurahan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat juga untuk menjawab perubahan regulasi yang ada.

1. Maksud penyusunan RKPKal Tahun Anggaran 2022

Maksud penyusunan RKP Kalurahan adalah dalam rangka memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dan pelaksanaan pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dan juga untuk melakukan penyesuaian anggaran menghadapi situasi dan aturan baru yang terbit.

2. Tujuan Penyusunan RKPKal adalah :

- a. RKPKal sebagai dokumen pedoman tertulis rencana kerja pemerintah kalurahan tahun anggaran 2022 yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b. Sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan kalurahan serta dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan yang berupa SDM, SDA, dan sumber daya yang lain seoptimal mungkin.
- c. Menerapkan konsep tahapan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak kalurahan.
- d. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).
- e. Memberikan motivasi dan semangat masyarakat untuk lebih maju dan dapat meraih Rencana Pembangunan 6 tahun.

C. LANDASAN HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 961);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
16. Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 12);
17. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2021 Nomor 4).

D. PENGERTIAN

1. Kalurahan adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kalurahan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan

- Pembangunan Kalurahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
 9. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
 10. Perencanaan pembangunan kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kalurahan.
 11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di kalurahan dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.
 12. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
 13. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang

- menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat kalurahan.
14. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi kalurahan.
 15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 16. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 17. Daftar Usulan RKP Kalurahan adalah penjabaran RPJM Kalurahan yang menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
 18. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan.
 19. Aset Kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APBKalurahan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
 21. Dana Kalurahan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan

- pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.
22. Alokasi Dana Kalurahan, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 23. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat,
 24. Lembaga adat kalurahan adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli kalurahan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat kalurahan.
 25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 27. SDGs Kalurahan adalah upaya terpadu mewujudkan kalurahan tanpa kemiskinan dan kelaparan, kalurahan ekonomi tumbuh merata, kalurahan peduli kesehatan, kalurahan peduli lingkungan, kalurahan peduli pendidikan, kalurahan ramah perempuan, kalurahan berjejaring, dan kalurahan tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

E. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2022 ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang

digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen APBKal Tahun Anggaran 2022.

Penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) tahun 2018-2024. Juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul yang memuat rancangan rencana kerja, program prioritas pembangunan, dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBN, APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II

EVALUASI RKPkal TAHUN SEBELUMNYA

A. REALISASI PENDAPATAN

Pendapatan Kalurahan meliputi semua penerimaan uang yang merupakan hak kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kalurahan. Perkiraan pendapatan kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Kalurahan, Dana Kalurahan, Alokasi Dana Kalurahan, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, serta pendapatan lain kalurahan.

Adapun Rencana dan Realisasi Pendapatan Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

| No | Uraian Pendapatan | Rencana (Rp) | Realisasi (Rp) (Agustus 2021) |
|-----------|--|----------------------|--|
| 1 | Pendapatan Asli Kalurahan (PAKalurahan) | 40.000.000 | 11.398.020 |
| 2 | Dana Desa | 1.714.909.000 | 1.361.427.200 |
| 3 | ADD | 1.318.995.371 | 766.997.452 |
| 4 | Bagi hasil pajak dan Restribusi | 276.387.116 | 138.193.558 |
| 5 | Bantuan Keuangan Kabupaten | 763.117.000 | 535.500.000 |
| 6 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0 | 0 |
| 7 | Pendapatan Lain-lain | 0 | 9.002.099 |
| | Jumlah | 4.113.408.487 | 2.822.518.329 |

B. PENGGUNAAN ANGGARAN

| No | Uraian Belanja | Rencana (Rp) | Realisasi (Rp) (Agustus 2021) |
|-----------|---|---------------------|--|
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan | 1.920.304.494 | 1.205.453.569 |
| 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan | 1.783.278.500 | 672.127.500 |
| 3 | Bidang Pembinaan Masyarakat | 705.396.150 | 372.588.523 |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat | 205.143.000 | 87.453.500 |
| 5 | Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa | 161.640.000 | 84.350.000 |

| | | | |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| | Jumlah | 4.775.762.144 | 2.421.973.092 |
|--|---------------|----------------------|----------------------|

BAB III

MEKANISME PENYUSUNAN RKPKal

Proses penyusunan Perubahan RKPKal tidak terlepas dari proses musyawarah Kalurahan yang melibatkan Pemerintah Kalurahan, Bamuskal dan unsur masyarakat. Setelah Tim Penyusun dibentuk, dan telah melakukan pencermatan terhadap dokumen RPJM Kalurahan, kemudian melakukan proses sebagai berikut :

A. PENYUSUNAN RKPKal

Mekanisme penyusunan RKPKal Tahun 2022 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan dalam rangka penyusunan RKPKal dengan melaksanakan kegiatan :
 - a. Mencermati ulang dokumen RPJM Kalurahan;
 - b. Menyetakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan; dan,
 - c. Mengusulkan Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah kalurahan, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah kalurahan menyusun rancangan RKPKal dan daftar usulan RKPKal.

2. Lurah membentuk Tim Penyusun RKPKal untuk mencermati pagu indikatif kalurahan dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke kalurahan, Pencermatan ulang dokumen RPJMKal, Penyusunan rancangan RKPKal, serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKPKal.
3. Tim Penyusun RKPKal melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Kalurahan dan Penyesuaian Program/Kegiatan yang masuk ke Kalurahan setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.

4. Tim Penyusun RKPKal mencermati ulang dokumen RPJMKal dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan kalurahan untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMKal.
5. Tim Penyusun RKPKal menyusun Rancangan RKPKal dengan berpedoman kepada :
 - a. Hasil kesepakatan musyawarah kalurahan;
 - b. Pagu indikatif kalurahan;
 - c. Rencana Pendapatan Asli Kalurahan;
 - d. Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten;
 - e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten;
 - f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan;
 - g. Hasil kesepakatan kerjasama antar Kalurahan; serta Hasil kesepakatan kerjasama Kalurahan dengan pihak ketiga.
6. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKPKal.
7. Tim penyusun RKPKal menyampaikan berita acara kepada Lurah tentang hasil penyusunan rancangan RKPKal yang dilampiri dokumen rancangan RKPKal dan rancangan daftar usulan RKPKal.
8. Lurah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPKal yang diikuti oleh Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan unsur masyarakat. Rancangan RKPKal yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan kalurahan tentang RKPKal.
9. Lurah menyampaikan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RKPKal kepada Bamuskal untuk dibahas dan disepakati bersama.
10. Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang RKPKal.

B. PENCERMATAN PAGU INDIKATIF DAN PENYELARASAN PROGRAM KEGIATAN

Proses ini dilakukan untuk mengetahui data yang valid tentang pagu indikatif yang akan masuk ke kalurahan dan program / kegiatan yang akan dilakukan di kalurahan pada tahun yang akan datang. Informasi yang diperoleh dari hasil pencermatan antara lain :

1. Rencana dana Desa yang bersumber dari APBN
Dana Desa senilai Rp. 1.714.909.000
2. Rencana alokasi dana Desa (ADD).
Alokasi Dana Desa senilai Rp. 1.318.995.371
3. Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi senilai Rp. 276.387.116
4. Rencana bantuan keuangan.
Bantuan Keuangan Kabupaten senilai Rp. 763.117.000
5. Pendapatan Asli
Hasil Aset Kalurahan Rp. 40.000.000

Sedangkan hasil penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Kalurahan pada tahun Anggaran 2021 diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten dalam bentuk Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan :

DAFTAR REKAPITULASI RENCANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN

TRIHARJO - PANDAK

| NO | PADUKUHAN | BIDANG | RENCANA KEGIATAN | ANGGARAN | | |
|----|-----------|-----------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | UNIT | HARGA | TOTAL |
| 1 | SIYANGAN | PAUD | 1. PAUD AL IHSAN | | | |
| | | | Laptop | 1 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| | | | Printer | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | Sound System | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | | | Thermogun | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | | | Tikar | 10 | 90.000 | 900.000 |
| | | | 2. PAUD IBNU KHOLDUN | | | - |
| | | | Laptop | 1 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| | | | Almari | 1 | 800.000 | 800.000 |
| | | | Thermogun | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | | KESEHATAN | 1. Posyandu Kenanga 1 | | | - |
| | | | Timbangan Bayi Digital GANTUNG | 1 | 200.000 | 200.000 |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------|----|-----------|-----------|
| | | Timbangan Bayi Duduk/ Tidur | 1 | 300.000 | 300.000 |
| | | Meja Kecil | 10 | 200.000 | 2.000.000 |
| | | Meja Panjang | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | | Kursi Plastik | 15 | 80.000 | 1.200.000 |
| | | Tikar | 2 | 90.000 | 180.000 |
| | | Gelas | 5 | 20.000 | 100.000 |
| | | Handsoap | 1 | 160.000 | 160.000 |
| | | Hand sanitizer | 1 | 150.000 | 150.000 |
| | | Masker | 6 | 50.000 | 300.000 |
| | | Thermogun | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| | | Laptop | 1 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| | | Printer | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | 2. Posyandu Kenanga 2 | | | - |
| | | Pengadaan Meja Panjang | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | | Kursi Plastik | 15 | 80.000 | 1.200.000 |
| | | Tensi Digital | 1 | 750.000 | 750.000 |
| | | Timbangan Digital | 2 | 200.000 | 400.000 |

| | | | | | | |
|---|--------|------------------|----------------------|----|-----------|-------------------|
| | | | Alat Peraga Edukasi | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | | | Thermogun | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| | | | Ember Cuci Tangan | 1 | 40.000 | 40.000 |
| | | | Handsoap | 1 | 120.000 | 120.000 |
| | | | Hand sanitizer | 1 | 150.000 | 150.000 |
| | | | Gloves | 2 | 20.000 | 40.000 |
| | | | Masker | 4 | 85.000 | 340.000 |
| | | | Face Shield | 14 | 15.000 | 210.000 |
| | | | Tikar | 2 | 90.000 | 180.000 |
| | | LINGKUNGAN HIDUP | Pembuatan Bak Sampah | 1 | 4.280.000 | 4.280.000 |
| | | BOP | | | | 1.500.000 |
| | | TOTAL | | | | 50.000.000 |
| | | | | | | |
| 2 | JUWONO | PAUD | Almari | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | APE Outdoor | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | | Thermogun | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | | | Laptop | 1 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| | | | Meja Kerja Guru | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |

| | | | | | |
|--|------------------|---|---|-----------|-------------------|
| | | Kursi | 1 | 200.000 | 200.000 |
| | KESEHATAN | Posyandu BALITA | | | - |
| | | APE Outdoor | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | Thermogun | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | | Timbangan Digital (2 in 1) | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| | | Posyandu REMAJA | | | - |
| | | Timbangan Digital | 1 | 200.000 | 200.000 |
| | | Tensimeter Digital | 1 | 750.000 | 750.000 |
| | | Posyandu LANSIA | | | - |
| | | Meja Panjang | 2 | 750.000 | 1.500.000 |
| | | Kursi | 8 | 200.000 | 1.600.000 |
| | | ALAT CHECK GULA DARAH, KOLESTEROL, ASAM URAT (SATU PAKET) | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | Thermogun | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | LINGKUNGAN HIDUP | Pembuatan Bak Sampah | 3 | 7.350.000 | 22.050.000 |
| | BOP | | | | 1.500.000 |
| | TOTAL | | | | 50.000.000 |

| 3 | NGABEAN | PAUD | Laptop | 1 | 7.500.000 | 7.500.000 | |
|---|---------|------------------|---|-----|-----------|------------|-------------------|
| | | | Printer | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| | | | Thermogun | 2 | 500.000 | 1.000.000 | |
| | | | Rak Barang | 3 | 1.000.000 | 3.000.000 | |
| | | KESEHATAN | POSYANDU | | | | - |
| | | | Timbangan dan Ukur Tinggi Badan | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| | | | Thermogun | 2 | 500.000 | 1.000.000 | |
| | | | ALAT CHECK GULA DARAH, KOLESTEROL, ASAM URAT (SATU PAKET) | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 | |
| | | | Rak Arsip | 6 | 1.000.000 | 6.000.000 | |
| | | LINGKUNGAN HIDUP | Pengadaan Bak Sampah | 120 | 200.000 | 24.000.000 | |
| | | BOP | | | | 1.500.000 | |
| | | TOTAL | | | | | 50.000.000 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------|-----------|------------------------|---|-----------|-----------|
| 4 | GUNTURAN | PAUD | Loker Anak | 2 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| | | | Meja Kerja Guru | 2 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| | | | Penampungan Air | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | Ayunan | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | Ternit Ruang KB | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | | Dapur | 1 | 2.010.000 | 2.010.000 |
| | | | Thermogun | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| | | KESEHATAN | Posyandu BALITA | | | - |
| | | | Thermogun | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| | | | Meteran Tinggi Badan | 2 | 70.000 | 140.000 |
| | | | Timbangan Ibu dan Anak | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| | | | APE Indoor (1-2 Tahun) | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | APE Indoor (3-5 Tahun) | 2 | 400.000 | 800.000 |
| | | | Laptop | 1 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| | | | Printer | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | Proyektor | 1 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| | | | Layar | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | POSBINDU | | | - |

| | | | | | |
|--|--------------|---------------------------------|---|-----------|-------------------|
| | | Thermogun | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | | Timbangan dan Ukur Tinggi Badan | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | Tensimeter Digital | 1 | 750.000 | 750.000 |
| | | Hand Sanitaser | 1 | 100.000 | 100.000 |
| | | Rak Kabinet | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | Posyandu LANSIA GUNTURAN | | | - |
| | | Tensimeter Digital | 1 | 750.000 | 750.000 |
| | | Thermogun | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | | Posyandu LANSIA KLISAT | | | - |
| | | Thermogun | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | | Timbangan dan Ukur Tinggi Badan | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | Tensimeter Digital | 1 | 750.000 | 750.000 |
| | BOP | | | | 1.500.000 |
| | TOTAL | | | | 50.000.000 |

| | | | | | | |
|---|-------|--------------|---------------------|---|-------------------|-----------|
| 5 | CIREN | PAUD | Loker PAUD | 4 | 1.000.000 | 4.000.000 |
| | | | Thermogun | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | | | Laptop | 1 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| | | | Printer | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | Sound System | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | | KESEHATAN | POSYANDU | | | - |
| | | | Laptop | 1 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| | | | Printer | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | Proyektor | 1 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| | | | Layar | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | Timbangan Digital | 1 | 200.000 | 200.000 |
| | | | Thermogun | 3 | 500.000 | 1.500.000 |
| | | | Sound System | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | | | PENANGANAN STUNTING | | | - |
| | | | Penyuluhan Stunting | 1 | 9.800.000 | 9.800.000 |
| | | BOP | | | 1.500.000 | |
| | | TOTAL | | | 50.000.000 | |

| | | | | | | |
|--------------|---------|-----------|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 6 | JALAKAN | PAUD | Atap dan Plafon | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | | Rolling Door | 1 | 4.800.000 | 4.800.000 |
| | | | Thermogun | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | | | Laptop | 1 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| | | | Etalase | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | Pagar Pengaman Gedung | 1 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| | | KESEHATAN | POSYANDU | | | - |
| | | | Timbangan (2 in 1) | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| | | | Thermogun | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | | | Laptop | 1 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| | | | Proyektor | 1 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| | | | Meja Panjang | 3 | 1.000.000 | 3.000.000 |
| | | | Almari | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | | Etalase | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | BOP | | | 1.500.000 | |
| TOTAL | | | 50.000.000 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------|-----------|---|----|-----------|-----------|
| 7 | JIGUDAN | PAUD | Laptop | 1 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| | | | Printer | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | Sound System | 2 | 3.500.000 | 7.000.000 |
| | | | Plafon Ruang PAUD | 1 | 9.700.000 | 9.700.000 |
| | | KESEHATAN | POSYANDU | | | - |
| | | | Thermogun | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| | | | Timbangan Digital | 2 | 200.000 | 400.000 |
| | | | Timbangan DACIM | 1 | 150.000 | 150.000 |
| | | | Infantometer | 2 | 100.000 | 200.000 |
| | | | Alat Tensi Digital | 2 | 750.000 | 1.500.000 |
| | | | ALAT CHECK GULA DARAH, KOLESTEROL, ASAM URAT (SATU PAKET) | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| | | | Stik Reagen | 10 | 30.000 | 300.000 |
| | | | Tikar | 5 | 200.000 | 1.000.000 |
| | | | Meja Ukuran KNAP | 3 | 400.000 | 1.200.000 |
| | | | Kursi Kayu | 12 | 200.000 | 2.400.000 |
| | | | Almari Kayu Sedang | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |

| | | | | | | |
|---|-------|--------------|---------------------|---|------------|-------------------|
| | | | Etalase Kaca | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | | Piring | 5 | 150.000 | 750.000 |
| | | | Sendok | 5 | 50.000 | 250.000 |
| | | | Ember Cuci Piring | 3 | 50.000 | 150.000 |
| | | | Ember Cuci Tangan | 3 | 50.000 | 150.000 |
| | | | Tempat Sampah | 3 | 50.000 | 150.000 |
| | | | APE In Door | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | PENANGANAN STUNTING | | | - |
| | | | Penyuluhan Stunting | 2 | 2.600.000 | 5.200.000 |
| | | BOP | | | | 1.500.000 |
| | | TOTAL | | | | 50.000.000 |
| | | | | | | |
| 8 | TIRTO | PAUD | Pembuatan Canopy | 1 | 10.800.000 | 10.800.000 |
| | | | Laptop | 1 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| | | | Printer | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | Televisi | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | | Sound System | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | | | Tempat Cuci Tangan | 2 | 1.400.000 | 2.800.000 |

| | | | | | |
|--|------------------|---|----|-----------|-------------------|
| | | Tikar Gulung | 2 | 200.000 | 400.000 |
| | | Thermogun | 4 | 500.000 | 2.000.000 |
| | | APD POSYANDU | 10 | 200.000 | 2.000.000 |
| | | Timbangan dan Ukur Tinggi Badan | 4 | 2.000.000 | 8.000.000 |
| | | Sarung Tangan Higienis | 1 | 200.000 | 200.000 |
| | | Stetoskop | 2 | 300.000 | 600.000 |
| | | Alkohol Swat | 1 | 50.000 | 50.000 |
| | | Tensimeter Digital | 1 | 750.000 | 750.000 |
| | | ALAT CHECK GULA DARAH, KOLESTEROL, ASAM URAT (SATU PAKET) | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | Tikar Gulung | 2 | 200.000 | 400.000 |
| | LINGKUNGAN HIDUP | Pengadaan Bak Sampah | 8 | 500.000 | 4.000.000 |
| | BOP | | | | 1.500.000 |
| | TOTAL | | | | 50.000.000 |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|
| 9 | JATEN | PAUD | Laptop | 1 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| | | | Galvalum untuk Canopy | 1 | 5.640.000 | 5.640.000 |
| | | | Thermogun | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | | | Tikar Gulung | 5 | 200.000 | 1.000.000 |
| | | | Meja | 2 | 400.000 | 800.000 |
| | | | Kursi | 4 | 200.000 | 800.000 |
| | | | Tempat Cuci Tangan | 1 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| | | KESEHATAN | Tensimeter Digital | 1 | 750.000 | 750.000 |
| | | | Senter PSN | 1 | 110.000 | 110.000 |
| | | INFRASTRUKTUR PADUKUHAN | Pembuatan Pasar Kuliner | 1 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| | | BOP | | | | 1.500.000 |
| TOTAL | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | |
| 10 | NGLARANG | PAUD | Galvalum, Canopy | 1 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | | | Kusen/Jendela | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | | Slot Pintu | 2 | 150.000 | 300.000 |
| | | | Semen | 10 | 500.000 | 5.000.000 |
| | | | Pasir | 3 | 245.000 | 735.000 |

| | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|------|-----------|--------------------|
| | | Batako | 1000 | 3.500 | 3.500.000 |
| | | Split | 1 | 260.000 | 260.000 |
| | | Talang | 10 | 40.000 | 400.000 |
| | | Instalasi listrik | 1 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| | | MCK | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | Pralon | 2 | 200.000 | 400.000 |
| | | Pompa Air | 1 | 655.000 | 655.000 |
| | | Meja | 2 | 400.000 | 800.000 |
| | | Kursi | 10 | 200.000 | 2.000.000 |
| | | Cat | 5 | 100.000 | 500.000 |
| | | Con Blok | 96 | 75.000 | 7.200.000 |
| | KESEHATAN | Thermogun | 4 | 500.000 | 2.000.000 |
| | BOP | | | | 1.500.000 |
| | TOTAL | | | | 50.000.000 |
| GRAND TOTAL | | | | | 500.000.000 |

2. Hasil penjarangan aspirasi masyarakat :

1. Penerangan Jalan Tirto RT 03 dan RT 06
2. Penerangan Jalan Jalakan RT 05 dan RT 06
3. Penerangan Jalan Ciren

C. MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

Dokumen Perubahan RKPDes yang telah disusun sudah melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDes yang diikuti oleh Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan unsur masyarakat pada bulan September 2021.

Hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan dituangkan dalam berita acara yang terlampir dalam dokumen Perubahan RKPDes.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2021 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional.

Berikut adalah Prioritas pengguna Dana Desa Tahun 2021 yang disepakati melalui forum musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan Triharjo :

**PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 7 Tahun 2021
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

| NO. | PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA | PRIORITAS CAPAIAN SDGs DESA | BENTUK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022 | DETAIL KEGIATAN | RENCANA ANGGARAN (Rp) |
|------------|--|---|---|---|------------------------------|
| 1 | Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa | Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan | Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan | Fasilitasi PAB/Kelompok Pengelola SPAMDes | 59,900,000 |
| | | | Pembangunan Sarana Penerangan Jalan | 01 Penerangan Jalan Tirto RT 03 dan RT 06 | 100,906,000 |
| | | | | 02 Penerangan Jalan Jalakan RT 05 dan RT 06 | |
| | | | | 04 Penerangan Jalan Ciren | |

| | | | | |
|--|--|---|---|-------------|
| | <p>pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan</p> | Pembentukan BUM Desa | Fasilitasi BUMDesa | 23,250,000 |
| | <p>Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa Sadar Lingkungan</p> | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Cair dan Agensia Hayati | 15,440,000 |
| | | <p>Fasilitasi Kelompok Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian dan Peternakan</p> | 01 Fasilitasi POKTAN | 210,162,000 |
| | | | 02 Fasilitasi KWT | |
| | | | 03 Fasilitasi dan Kapasitas Kelompok Tani | |
| | | | 04 Pembangunan Gubug Tani | |
| | | 01 Bantul Expo | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------|
| | | | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif | 02 Pandak Expo 03 Triharjo Expo/Bazar/Fasilitasi UMKM | 89,850,000 |
| 2 | Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa | Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan (Dipilih) | 01 Pengelolaan Informasi Kalurahan Wisata | 99,280,000 |
| | | | | 02 Pelatihan/ Peningkatan Kapasitas POKDARWIS | |
| | | | | 03 Pertemuan POKDARWIS | |
| | | | | 4. Wisata Desa | |
| | | | | 5. Dukungan Kerjasama Pengembangan inovasi Kalurahan | |
| | | Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan | Drainase Bulak Jomblang | 69,918,000 |
| | | pencegahan stunting untuk mewujudkan | Penyelenggaraan Posyandu | sosialisasi pola asuh Baduta | 116,865,000 |

| | | | | |
|--|---|---|--|------------|
| | Desa sehat dan sejahtera; dan | | kalibrasi alat antropometri | |
| | | | Pemantau Bumil dan Baduta | |
| | | | Pemberian Makanan Tambahan | |
| | | | Dukungan honor untuk kader dan KPM | |
| | Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif | Dukungangan Bagi Siswa Miskin /Berprestasi | Pemberian 50 paket perlengkapan sekolah | 25,725,000 |
| | | | Pemberian uang pembinaan bagi siswa miskin berprestasi | |
| | | Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan/PSN | 01. PSN | 17,580,000 |
| | | | 02. IPSM | |
| | 03. Penanganan ODGJ | | | |
| | | Pembinaan Kampung KB | Fasilitas Kampung KB | 4,050,000 |

| | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---|---|-------------|
| | | | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | Peningkatan Kesejahteraan Wanita Rawan Sosial Ekonomi | 14,735,000 |
| | | | Fasilitasi/Penyuluhan/Sosialisasi KDRT, Bina Keluarga Sakinah | Desa Binaan Keluarga Sakinah | 12,715,000 |
| | | | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | Fasilitasi Puskessos | 11,162,500 |
| | | | Pembinaan di Bidang Keagamaan | Operasional Kaum Rois | 41,682,500 |
| | | | | Pengajian Rutin | |
| | | | | Pembinaan Pengurus Keagamaan | |
| | | | | Pengiriman Kontingen MTQ | |
| | | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kemasyarakatan | 01. Operasional | 192,500,244 |
| | | | | 02. Pembangunan LKM Ngabean | |
| | | | | 03. Pembangunan Balai Kemasyarakatan Gunturan | |
| 3 | Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan | mitigasi dan penanganan bencana alam; | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga FPRB | Fasilitasi FPRB | 73,512,500 |

| | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|----------------------|
| bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa | mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan | Penyelenggaraan KALURAHAN Siaga Kesehatan | Penyuluhan Kesehatan | 15,475,000 |
| | mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa; | Kegiatan Penanggulangan Bencana | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa | 20,000,000 |
| JUMLAH | | | | 1,194,708,744 |

Secara total rancangan anggaran yang termuat dalam dokumen Perubahan RPKal Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

| No | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | Keterangan | Sumber Dana | Value | Pelaksana kegiatan | Tim Pelaksana Kegiatan |
|------------------------------------|--|---|--|---|-------------|----------------|--------------------|------------------------|
| 1 | PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN | 1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Kalurahan | 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah | Siltap Lurah | ADD | Rp 60,180,672 | SUDARMANTA | |
| | | | 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan | Siltap Pamong | ADD | Rp 630,489,605 | SUDARMANTA | |
| | | | 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan | 01. Jaminan Sosial Lurah | ADD | Rp 58,256,386 | SUDARMANTA | |
| | | | | 02. Jaminan Sosial Pamong | | | | |
| | | | 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan | Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan dan gaji staf | ADD | Rp 497,938,000 | HARIYANTI | |
| | | | 5. Penyediaan Tunjangan Bamuskal | 01. Tunjangan Kedudukan BAMUSKAL | ADD | Rp 155,300,000 | ISMADI RAHARJO | |
| | | | | 02. Tunjangan Kinerja BAMUSKAL | | | | |
| 6. Penyediaan Operasional Bamuskal | Operasional Bamuskal | ADD | Rp 30,500,000 | ISMADI RAHARJO | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------|-----|----------------|----------------|--|---------------------------------------|
| | | 7. Penyediaan Insentif/ Operasional RT/ RW | Operasional RT | ADD | Rp 87,190,000 | SUDARMANTA | | |
| | | 8. Penyediaan Tunjangan Kinerja bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 01. Tunjangan Kinerja Lurah | PBH | Rp 123,600,000 | SUDARMANTA | | |
| | | | 02. Tunjangan Kinerja Pamong | | | | | |
| | | | 03. Tunjangan Kinerja Staf | | | | | |
| | | 9. Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 01. THR Lurah | PBH | Rp 86,104,246 | SUDARMANTA | | |
| | | | 02. THR Pamong Kalurahan | | | | | |
| | | | 03. THR Staf | | | | | |
| | | | 04. THR BAMUSKAL | | | | | |
| | | 10. Jaminan sosial bagi BAMUSKAL | Jaminan sosial bagi BAMUSKAL | ADD | Rp 1,768,764 | ISMADI RAHARJO | | |
| | 2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan | 1. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan | 01. Peralatan Mebelair | ADD | Rp 85,850,000 | HARIYANTI | | |
| | | | | | | | | 02. Perlengkapan Gedung |
| | | | | | | | | 03. Peralatan Elektronik dan Komputer |
| | | 2. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana | Belanja Pemeliharaan Bangunan | ADD | Rp 27,000,000 | HARIYANTI | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|---------------|----------------|--|
| | | Kantor Kalurahan (Dipilih) | | | | | |
| | | 3. Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Kalurahan | Belanja Pemeliharaan Peralatan | ADD | Rp 11,000,000 | | |
| | 3. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1. Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Kalurahan | Pendataan Profil | ADD | Rp 11,400,000 | SUDARMANTA | |
| | 4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/ Pembahasan APB Kalurahan | Penyelenggaraan Muskal / Musrenbangdes | ADD | Rp 18,542,000 | ISMADI RAHARJO | |
| | | 2. Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler) | Rapat Pemerintahan Umum | ADD | Rp 12,538,000 | SUDARMANTA | |
| | | 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan | Penyusunan RPKKal dan Perubahan RPKKal | ADD | Rp 13,105,000 | ISMADI RAHARJO | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---|-----|---------------|----------------|---|
| | | | 01. Penyusunan Dokumen APBKal | | | | |
| | | 4. Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan | 02. Penyusunan Dokumen APBKal Perubahan | ADD | Rp 14,946,000 | ISMADI RAHARJO | |
| | | | 03. Penyusunan Dokumen LPJ APBKal | | | | |
| | | | 5. Penyusunan Kebijakan Kalurahan | | | | Penyusunan Perkal/muskal/ rembuk dusun |
| | 5. Pertanian | 1. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Pengelolaan Intensifikasi PBB-P2 | ADD | Rp 42,620,000 | SUDARMANTA | Pembina : Suwardi, S.Pd Singgih Ketua : Estu Raharjo, S.Sos Desi Tri Sekretaris : Utami, A. Md Anggota : Kasdija SofuwanAd ilKurniawa n,S.S.E Sudarmanta |



| | | | | | | | | |
|---|---|---------------|--|---|-------|----------------|---------|---|
| | | | | | | | | WahyudinEfendi Sukijan DikaYunanto,S.Pd. BurhanudinNuryanto Marsidi TriJoko Friyanto PantoRiyadi DukuhJaten Subowo |
| 2 | PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN | 1. Pendidikan | 1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan | 1. Penyelenggaraan PAUD / TPA | DDS | Rp 74,037,500 | DARSANA | Ketua : Wahyudin Efendi |
| | | | | 2. Penyelenggaraan PAUD/Kelompok Bermain (KB) | | | | Sekretaris : Yayan Susanto |
| | | | | 3. Penyelenggaraan PAUD / TK | | | | Anggota : Dika Yunanto, S.Pd. |
| | | | | 4. Belanja Barang Perlengkapan untuk : | PPBMP | Rp 239,742,268 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----|---------------|---------|--|--|
| | | | <p>a. PAUD/ KB AL IHSAN siyangan</p> <p>b. PAUD/ KB IBNU KHOLDUN siyangan</p> <p>c. PAUD/KB PERMATA BUNDA JUWONO</p> <p>d. PAUD NGABEAN</p> <p>e. PAUD GUNTURAN</p> <p>f. PAUD CIREN</p> <p>g. PAUD JALAKAN</p> <p>h. PAUD Jigudan</p> <p>i. PAUD Tirto</p> <p>j. PAUD Jaten</p> <p>k. PAUD Nglarang</p> | | | | | |
| | | 2. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi | <p>1. Dukungan Pendidikan bagi Siswa MiskinBerprestasi</p> <p>2. Penghargaan Siswa Berprestasi</p> | DDS | Rp 25,725,000 | DARSANA | <p>Ketua : Ratnawati</p> <p>Sekretaris : Yayan Susanto</p> <p>Anggota : Sarmini Kasdijo Nur Hidayati</p> | |



| | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|-------|----------------|----------------|---|
| | | | 1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kalurahan/ Polindes Milik Kalurahan | Fasilitasi PPKBD | DDS | Rp 33,140,000 | DARSANA | |
| | | 2. Kesehatan | | 1. Penanganan Stunting / POSYANDU | DDS | Rp 116,865,000 | | Ketua : Ratnawati Sekretaris : Yayan Susanto Anggota : Jumiwati Narsih Sulistinah |
| | | | 2. Penyelenggaraan Posyandu | 2. Belanja Barang Perlengkapan untuk : a. Posyandu Kenanga 1 Siyangan b. Posyandu Kenanga 2 Siyangan c. Posyandu Balita Juwono d. Posyandu REMAJA Juwono e. Posyandu LANSIA Juwono f. Posyandu BALITA Gunturan | PPBMP | | Rp 173,319,588 | DARSANA |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|----------------------------|-----|---------------|-------------|--|
| | | g. POSBINDU Gunturan h. Posyandu LANSIA GUNTURAN i. Posyandu LANSIA KLISAT j. POSYANDU Ciren k. Posyandu Jalakan l. Posyandu Jigudan m. Posyandu Tirto n. Posyandu Jaten o. Posyandu Nglarang | | | | | |
| | | 3. Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan | Penyuluhan Kesehatan | DDS | Rp 15,475,000 | DARSANA | |
| | | 4. Pembinaan Kampung KB | Fasilitasi Kampung KB | DDS | Rp 4,050,000 | DARSANA | |
| | | 5. Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan/ PSN | 1. PSN | DDS | Rp 17,580,000 | DARSANA | Ketua : Mujiyem |
| | | | 2. IPSM | | | | Sekretaris : Yayan Susanto |
| | | | 3. Penanganan ODGJ | | | | Anggota : Kasdijo |
| | 3. Pekerjaan Umum dan | 1. Pembangunan/ Rehabilitasi/ | 01 Drainase Bulak Jomblang | DDS | Rp 69,918,000 | SUMARDI, BA | Ketua : Maryadi Sekretaris : Alfitasari |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|---|
| | Penataan Ruang | Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan | 02 Rehabilitasi Drainase Ciren RT 06 | DDS | Rp 10,000,000 | SUMARDI, BA | Anggota : Tri Joko |
| | | 2. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Kalurahan/ Balai Kemasyarakatan | 01 Pembangunan LKM Ngabean | DDS | Rp 192,500,244 | SUMARDI, BA | Ketua : Dika Sekretaris : Alfitasari Anggota : Burhannudin Nuryanto |
| 02 Pembangunan Balai Kemasyarakatan Gunturan | Ketua : Burhannudin Nuryanto Sekretaris : Alfitasari Anggota : Dika Yunanto | | | | | | |
| | 4. Kawasan Pemukiman | 1. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan | Fasilitas PAB | DDS | Rp 59,900,000 | SUMARDI, BA | Ketua : Ari Hernawan Sekretaris : Alfitasari Anggota : Panto Riyadi |
| | | 2. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kalurahan (Penampungan, Bank Sampah, dll) | Pembuatan Bak Sampah | PPBMP | Rp 56,005,000 | SUMARDI, BA | Ketua : Panto Riyadi |
| | | | 1. Siyangan | | | | Sekretaris : Alfitasari |
| | | | 2. Juwono | | | | Bendahara : Tri Joko |
| | | | 3. Ngabean | | | | |
| 4. Tirto | | | | | | | |
| 5. Perhubungan, Komunikasi | 1. Pembangunan/ Peningkatan/ | 1. Penerangan Jalan Tirto RT 03 dan RT 06 | DDS | Rp 100,906,000 | SUMARDI, BA | Ketua : Burhanudin Nuryanto | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----|----------------|-------------|---|
| | dan Informatika | Pengadaan Sarana Penerangan Jalan | 2. Penerangan Jalan Jalakan RT 05 dan RT 06 | | | | Sekretaris : Alfitasari |
| | | | 3. Penerangan Jalan Ciren | | | | Anggota : Marsidi |
| | 6. Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 1. Pelatihan Pengelolaan/ Pengolahan Sampah | Pengelolaan Sampah | BKK | Rp 500,000,000 | SUMARDI, BA | |
| | 7. Pariwisata | 1. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan | 1. Pengelolaan Informasi Kalurahan Wisata | DDS | Rp 99,280,000 | SUMARDI, BA | Pembina : Suwardi, S.Pd. |
| | | | 2. Pelatihan/ Peningkatan Kapasitas POKDARWIS | | | | Ketua : Sofuwan Adil.K., SE. |
| | | | 3. Pertemuan POKDARWIS | | | | Petugas layanan informasi : Ragil Tyas Wiworo Yekti Ratih Puspitasari |
| | | | 4. Wisata Desa | | | | Petugas website : Hery Mustofa |
| | | | 5. Dukungan Kerjasama Pengembangan inovasi Kalurahan | | | | Petugas dokumentasi arsip : Yayan Susanto |
| | | | | | | | Petugas sengketa aduan : Sumardi, BA. |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---|--|--|-----|----------------|------------|----------------------------|
| 3 | PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 1. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1. Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan | Pelaksanaan Jadwal Ronda | ADD | Rp 524,435,000 | SUDARMANTA | |
| | | | 2. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan | 01. Peningkatan Kapasitas Linmas Kalurahan | ADD | Rp 17,585,000 | SUDARMANTA | |
| | | | | 02. Operasional Linmas | | | | |
| | | | 3. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga FPRB | Operasional FPRB | DDS | Rp 73,512,500 | SUDARMANTA | |
| | | | 5. Pelatihan/ Penyuluhan / Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. | Fasilitasi Puskesmas | DDS | Rp 11,162,500 | DARSANA | |
| | | 2. Kebudayaan dan Keagamaan | 1. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan | Pengiriman Kontingen HUT Kabupaten | ADD | Rp 5,130,000 | DARSANA | |
| | | | 2. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan dan Keagamaan | 1. Sarasehan | ADD | Rp 66,702,500 | DARSANA | Ketua : Tri Joko |
| | | | | 2. Tabur Bunga | | | | Sekretaris : Yayan Susanto |
| | | | | 3. Upacara Hari Jadi KALURAHAN | | | | Anggota : Alfitasari |
| 4. Pengajian | Kasdiyo | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--------------------------------------|-----|----------------|-------------|----------------------------|
| | | | 5. Peringatan Hari Besar Keagamaan | | | | Hery Mustofa |
| | | 3. Pembinaan Bidang Keagamaan | 1. Operasional Kaum Rois | DDS | Rp 41,682,500 | DARSANA | Ketua : Muh. Alip |
| | | | 2. Pengajian Rutin | | | | Sekretaris : Yayan Susanto |
| | | | 3. Pembinaan Pengurus Keagamaan | | | | Anggota : Tova Anwar |
| | | | 4. Pengiriman Kontingen MTQ | | | | Suwari |
| | | | | | | | Hery Mustofa |
| | | 4. Pemeliharaan/ Pembinaan/ Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi | Pembinaan Pengurus KALURAHAN Budaya | ADD | Rp 2,362,500 | DARSANA | |
| | 3. Kepemudaan dan Olahraga | 1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Kalurahan tkt Kec/Kab/Kota | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & OR | ADD | Rp 7,655,000 | DARSANA | |
| | | 2. Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan | Penyelenggaraan Senam | ADD | Rp 6,612,500 | DARSANA | |
| | | 3. Pembangunan/ Rehabilitasi/ | 01. Operasional | DDS | Rp 282,385,327 | SUMARDI, BA | Ketua : Maryadi |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|------------------------------------|--|---|-----|---------------|-------------|--|
| | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Kalurahan | 02. GOR | | | | Sekretaris : Alfitasari |
| | | | | 03. Jogging Track | | | | Anggota : Tri Joko |
| | | | 4. Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Kalurahan | 01 Operasional Karang Taruna | ADD | Rp 12,693,400 | DARSANA | |
| | | | | 02 Bulan Bakti Karang Taruna | | | | |
| | | 4. Kelembagaan Masyarakat | 1. Pembinaan LKM Kalurahan/ LPM/ LPM Kalurahan | Operasional LPMK | ADD | Rp 5,448,000 | SUDARMANTA | |
| | | | 2. Pembinaan PKK | 1. Operasional PKK | ADD | Rp 18,479,000 | DARSANA | |
| | | | | 2. Monev PKK Padukuhan | | | | |
| | | | | 3. Peningkatan Kapasitas | | | | |
| 4 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 2. Pertanian dan Peternakan | 1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Cair dan Agensia Hayati | DDS | Rp 15,440,000 | SUMARDI, BA | Ketua : Tri Joko Sekretaris : Alfitasari Anggota : Burhanudin Nuryanto |
| | | | 2. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ sederhana | Angkat Walet | DDS | Rp 38,550,000 | SUMARDI, BA | Ketua : Maryadi Sekretaris : Alfitasari Anggota : Burhanudin Nuryanto |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----|----------------|-------------|---|
| | | | 1. Fasilitasi POKTAN | | | | Ketua : Burhannudin Nuryanto Sekretaris : Alfitasari Anggota : Muhamad Alip |
| | | 3. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian | 2. Fasilitasi KWT | DDS | Rp 210,162,000 | SUMARDI, BA | |
| | | | 3. Fasilitasi dan Kapasitas Kelompok Tani | | | | |
| | | | 4. Pembangunan Gubug Tani | | | | |
| | | | | | | | |
| | 3. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 1. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | WRSE | DDS | Rp 14,735,000 | DARSANA | |
| | | 2. Fasilitasi/ Penyuluhan/ Sosialisasi KDRT/ Bina Keluarga Sakinah | DBKS | DDS | Rp 12,715,000 | DARSANA | |
| | 5. Dukungan Penanaman Modal | 1. Pembentukan BUM Kalurahan | Subsidi operasional BUMDES | DDS | Rp 23,250,000 | SUMARDI, BA | Ketua : Dika Yunanto, S.Pd Sekretaris : Alfitasari Anggota : Tri Joko |
| | 6. Perdagangan dan Perindustrian | 1. Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif | 1. Bantul Expo | DDS | Rp 89,850,000 | SUMARDI, BA | Ketua : Tri Joko Sekretaris : Alfitasari Anggota : Dika Yunanto, S.Pd |
| | | | 2. Pandak Expo | | | | |
| | | | 3. Triharjo Expo | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--|------------------------|-------|---------------|-------------|---|
| | | | 2. Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan | Rintisan Pasar Kuliner | PPBMP | Rp 30,925,000 | SUMARDI, BA | Ketua : Burhanudin Nuryanto Sekretaris : Alfitasari Anggota : Marsidi |
| 5 | PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN | 1. Penanggulangan Bencana | 1. Penanggulangan Bencana | | DDS | Rp 20,000,000 | SUDARMANTA | |
| | | 2. Keadaan Mendesak | 1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) | | DDS | Rp 9,000,000 | SUDARMANTA | |

| PEMBIAYAAN | | |
|-------------------|----------------------------|--|
| 1 | Penerimaan Pembiayaan | |
| | SILPA Tahun sebelumnya | |
| 2 | Pengeluaran Pembiayaan | |
| | Penyertaan Modal Kalurahan | |
| | | |

BAB V

DAFTAR USULAN RKPKal DAN USULAN KEGIATAN YANG DIDANAI OLEH DANA KEISTIMEWAAN

A. GAMBARAN UMUM DAFTAR USULAN RKPKal

Berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan dengan tujuan untuk membahas dan menyepakati rancangan Perubahan RKPKal, yang diikuti dan dihadiri oleh Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan unsur masyarakat, ada beberapa usulan yang diajukan untuk dianggarkan dari APBD Kabupaten Bantul dengan beberapa alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Beberapa kegiatan yang diprioritaskan Kalurahan bukan menjadi kewenangan Kalurahan;
2. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kalurahan;
3. Kegiatan tersebut menjadi kebutuhan masyarakat Kalurahan;

Selain ada beberapa kegiatan yang tidak dimasukkan dalam rancangan RKPKal, forum juga menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Usulan Kegiatan yang didanai oleh Dana Keistimewaan.
2. Tim yang membawa Daftar Usulan RKPKal di forum Musrenbang Kecamatan sebagai berikut :
 - a. Maryono dengan alamat Ciren
 - b. Danang Wijanarko dengan alamat Siyangan
 - c. H. Muryadi dengan alamat Gunturan
 - d. Retno Demawati dengan alamat Gunturan

B. PROGRAM KEGIATAN DAFTAR USULAN RKPKal

Program kegiatan Daftar Usulan RKPKal yang menjadi usulan kesepakatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kalurahan Triharjo tidak ada perubahan.

BAB VI

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat Kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi Pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama membangun kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Kalurahan. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadahi.

Diharapkan proses penyusunan perubahan RKP Kal yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala kalurahan menuju kemandirian kalurahan. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat, maka diharapkan dalam proses penyusunan perubahan APB Kal seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

LURAH TRIHARJO

SUWARDI

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2022

KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 7 Tahun 2021
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

| NO. | PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA | PRIORITAS CAPAIAN SDGs DESA | BENTUK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022 | DETAIL KEGIATAN |
|------------------------------|---|---|---|---|
| 1 | Penggunaan Dana Desa untuk pemuliharaan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa | Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan | Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan | Fasilitasi PAB/Kelompok Pengelola SPAMDes |
| | | | Pembangunan Sarana Penerangan Jalan | 01 Penerangan Jalan Tirto RT 03 dan RT 06 |
| | | | | 02 Penerangan Jalan Jalakan RT 05 dan RT 06 |
| | | | 04 Penerangan Jalan Ciren | |
| | | pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan | Pembentukan BUM Desa | Fasilitasi BUMDesa |
| | | Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Cair dan Agensia Hayati |
| Fasilitasi Kelompok Kelompok | 01 Fasilitasi POKTAN 02 Fasilitasi KWT | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa Sadar Lingkungan | Masyarakat di Bidang Pertanian dan Peternakan | 03 Fasilitasi dan Kapasitas Kelompok Tani 04 Pembangunan Gubug Tani |
| | | | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif | 01 Bantul Expo 02 Pandak Expo 03 Triharjo Expo/Bazar |
| | | Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan (Dipilih) | 01 Pengelolaan Informasi Kalurahan Wisata 02 Pelatihan/Peningkatan Kapasitas POKDARWIS 03 Pertemuan POKDARWIS |
| | | Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan | Drainase Bulak Jomblang |
| | | pengecahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan | Penyelenggaraan Posyandu | sosialisasi pola asuh Baduta kalibrasi alat antropometri Pemantau Bumil dan Baduta Pemberian Makanan Tambahan Dukungan honor untuk kader dan KPM |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| 2 | Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa | Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif | Dukungan Bagi Siswa Miskin /Berprestasi | Pemberian 50 paket perlengkapan sekolah |
| | | | | Pemberian uang pembinaan bagi siswa miskin berprestasi |
| | | | Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan/PSN | 01. PSN |
| | | | | 02. IPSM |
| | | | | 03. Penanganan ODGJ |
| | | | Pembinaan Kampung KB | Fasilitasi Kampung KB |
| | | | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | Peningkatan Kesejahteraan Wanita Rawan Sosial Ekonomi |
| | | | | Desa Binaan Keluarga Sakinah |
| | | | Fasilitasi/Penyuluhan/Sosialisasi KDRT, Bina Keluarga Sakinah | |
| | | | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | Fasilitasi Puskessos |
| | | | Pembinaan di Bidang Keagamaan | Operasional Kaum Rois |
| | | | | Pengajian Rutin |
| | | | | Pembinaan Pengurus Keagamaan |
| | Pengiriman Kontingen MTQ | | | |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kemasyarakatan | Pembangunan Lembaga Keswadayaan Masyarakat di Ngabean | | | |

| | | | | |
|---------------|--|--|---|----------------------------------|
| 3 | Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa | mitigasi dan penanganan bencana alam; | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga FPRB | Fasilitasi FPRB |
| | | mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan | Penyelenggaraan KALURAHAN Siaga Kesehatan | Penyuluhan Kesehatan |
| | | mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa; | Kegiatan Penanggulangan Bencana | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa |
| JUMLAH | | | | |

| RENCANA ANGGARAN (Rp) |
|----------------------------------|
| 4.900.000 |
| 18.897.000 |
| 18.527.000 |
| 19.752.000 |
| 23.250.000 |
| 15.440.000 |
| 71.850.000 |
| 13.455.000 |



| |
|-------------|
| 9.825.000 |
| 115.602.000 |
| 6.200.000 |
| 2.250.000 |
| 81.400.000 |
| 14.730.000 |
| 4.300.000 |
| 10.250.000 |
| 69.918.000 |
| 116.865.000 |

| |
|-------------|
| 15.175.000 |
| 10.550.000 |
| 8.940.000 |
| 3.040.000 |
| 5.600.000 |
| 4.050.000 |
| 14.735.000 |
| 12.715.000 |
| 6.412.500 |
| 16.800.000 |
| 8.950.000 |
| 3.932.500 |
| 2.000.000 |
| 545.161.179 |

| |
|----------------------|
| 133.972.500 |
| 15.475.000 |
| 30.000.000 |
| 1.424.919.679 |